

Perdagangan Berkelanjutan sebagai Instrumen Diplomasi Ekonomi Indonesia

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Inten Suhartien Universitas Sulawesi Tenggara intensoehartien@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Suhartien, I. (2025). Perdagangan Berkelanjutan sebagai Instrumen Diplomasi Ekonomi Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5983-5989.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Indonesia menggunakan perdagangan berkelanjutan sebagai alat diplomasi ekonomi di tengah dinamika ekonomi politik internasional. Hasil penelitian menemukan bahwa norma keberlanjutan saat ini telah menjadi bagian penting dalam sistem perdagangan multilateral. Hal ini tidak saja meningkatkan biaya ekspor, tapi juga berpengaruh besar pada kelangsungan perusahaan Indonesia di pasar global, termasuk daya saing beberapa komoditi penting seperti udang, pulp dan kertas, hingga tuna. Norma keberlanjutan sebenarnya bukan saja tantangan secara eksternal. Namun juga merupakan persaingan dalam bentuk regulasi ekonomi yang membuat Indonesia harus mampu beradaptasi dan membentuk kebijakan yang terkoordinasi. Penelitian ini menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak saja bersifat adaptif dan reaktif, tapi lebih dari itu untuk aktif terlibat secara strategis. Salah satunya dengan memanfaatkan forum multilateral, aktif dalam negosiasi sektoral, serta terlibat langsung dalam pembentukan aturan. Lebih lanjut, perdagangan berkelanjutan bukan saja mengenai kepatuhan terhadap regulasi, namun telah berkembang menjadi senjata diplomasi strategis yang dapat berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia, membuka akses pasar, serta menambah ruang gerak pembangunan nasional.

Kata kunci: Diplomasi Ekonomi, Perdagangan, Keberlanjutan, Ekspor, Pembangunan Nasional

Abstract

This study examines how Indonesia utilizes sustainable trade as an instrument of economic diplomacy amid the dynamics of international political economy. The findings indicate that sustainability norms have become an integral component of the multilateral trading system. These norms not only increase export costs but also significantly affect the survival of Indonesian firms in global markets, including the competitiveness of key commodities—such as shrimp, pulp and paper, and tuna. Sustainability norms are not merely external challenges; they also constitute a form of regulatory competition that compels Indonesia to adapt and develop coordinated policy responses. This research underscores the importance of Indonesia moving beyond an adaptive and reactive posture toward a more proactive and strategic engagement. This includes leveraging multilateral forums, actively participating in sectoral negotiations, and directly contributing to rule-making processes. Furthermore, sustainable trade is no longer solely about regulatory compliance. It has evolved into a strategic diplomatic instrument with the potential to strengthen Indonesia's bargaining position, expand market access, and enhance the policy space for national development.

Keywords: Economic Diplomacy, Trade, Sustainability, Export, National Development

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, perdagangan internasional diharapkan jadi alat ekonomi global yang tumbuh sejalan dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Sistem perdagangan global seharusnya memasukkan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan dan perjanjian dagang, agar aktivitas perdagangan bukan sekadar mengejar efisiensi ekonomi, tapi juga membantu mengatasi perubahan iklim dan menjaga ekosistem. Pola pikir ini terlihat jelas pada konsep perdagangan berkelanjutan, yang menekankan keterkaitan erat antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan perdagangan internasional.

Praktik perdagangan internasional saat ini bergerak dengan dinamika yang kompleks. Sistem perdagangan multilateral terasa makin tertekan, salah satu factor utamanya karena proteksionisme dan ketidakpastian kebijakan ekonomi global terus meningkat. Meski begitu, volume perdagangan barang dunia masih tumbuh, walau tak secepat sebelumnya. Salah satu perubahan yang paling terasa yaitu makin banyak kebijakan non-tarif bermunculan—terutama standar lingkungan dan sosial—dan ini langsung berdampak pada akses pasar internasional. Untuk Indonesia, situasi ini menjadi tantangan nyata. Indonesia harus beradaptasi dengan syarat keberlanjutan yang semakin ketat, misalnya aturan bebas deforestasi. Pemerintah juga perlu bergerak cepat mengembangkan mekanisme penelusuran digital demi memetakan komoditas ekspor strategis secara lebih transparan dan akurat.

Berbagai kajian di bidang Hubungan Internasional dan ekonomi politik global menunjukkan perdagangan berkelanjutan bukan sekadar respons terhadap isu lingkungan. Lebih dari itu, perdagangan berkelanjutan kini menjadi alat penting dalam diplomasi ekonomi dan *economic statecraft*. Negara-negara memanfaatkan standar keberlanjutan untuk menjaga kepentingan nasional, memperkuat posisi tawar, dan membentuk preferensi saat bernegosiasi di ranah perdagangan internasional. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana Indonesia memakai perdagangan berkelanjutan sebagai alat diplomasi ekonomi utamanya dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri dan agenda pembangunan nasional, masih terbatas.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perdagangan berkelanjutan dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi analitis terhadap pengembangan kajian diplomasi ekonomi Indonesia serta menyediakan dasar konseptual bagi perumusan kebijakan perdagangan luar negeri yang responsif terhadap dinamika global.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, strategi, dan dinamika penggunaan perdagangan berkelanjutan sebagai instrumen diplomasi ekonomi Indonesia dalam konteks hubungan internasional. Fokus penelitian tidak terletak pada pengujian hubungan kausal statistik, melainkan pada analisis kebijakan, praktik diplomasi, serta interaksi antara norma global dan kepentingan nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam bagaimana konsep perdagangan berkelanjutan diartikulasikan dan diimplementasikan dalam kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia, serta bagaimana kebijakan tersebut digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan diplomasi ekonomi.

Data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui telaah dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, serta publikasi lembaga terkait yang relevan dengan isu perdagangan pangan dan diplomasi ekonomi. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, artikel jurnal, laporan penelitian, serta publikasi media yang mendukung analisis. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tersebut, dengan fokus pada kebijakan perdagangan, perjanjian internasional, serta data statistik impor-ekspor pangan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif berbasis studi literatur. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang mengikuti prinsip analisis interaktif. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi relevan terkait diplomasi ekonomi dan ketahanan pangan, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi yang mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoritik hubungan internasional dan ekonomi politik.

Untuk menjamin validitas, penelitian menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari dokumen resmi, laporan internasional, dan literatur akademik.

Penggunaan berbagai sumber dimaksudkan untuk memperkuat keabsahan interpretasi serta mengurangi bias analisis. Metodologi ini dipilih agar penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai perdagangan berkelanjutan sebagai sebuah instrument diplomasi ekonomi, sekaligus mengisi kesenjangan literatur yang telah teridentifikasi.

Penelitian ini dibatasi pada analisis kebijakan dan praktik diplomasi ekonomi Indonesia dalam konteks perdagangan berkelanjutan pada periode kontemporer. Penelitian tidak mencakup pengukuran dampak kuantitatif terhadap pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan secara langsung, melainkan menitikberatkan pada aspek strategis dan diplomatik.

C. Hasil Dan Pembahasan

Dalam berbagai literatur hubungan internasional dan ekonomi politik, perdagangan berkelanjutan muncul sebagai alat kebijakan yang mencoba menggabungkan liberalisasi perdagangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari sudut pandang institusionalisme liberal, kunci pencapaiannya ada pada institusi internasional yang bisa menampung berbagai kepentingan negara dan mengontrol perilaku negara-negara melalui aturan yang mengikat. Dalam hal ini, World Trade Organization (WTO) mengambil peran utama dalam menetapkan kerangka regulasi, menurunkan biaya transaksi, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memastikan semua pihak menaati aturan, termasuk mengenai lingkungan dalam perdagangan global (WTO, n.d.; TESS at the WTO, 2025). Lewat negosiasi kolektif dan prinsip keterbukaan, rezim perdagangan multilateral menanamkan aspek keberlanjutan ke dalam aturan main perdagangan internasional. Hal ini bukan saja mengatur regulasi tetapi juga berfungsi untuk menjaga kepastian pasar dan mencegah ketimpangan akses antarnegara anggota.

Konsep *competitive sustainability* menyoroti pentingnya menyeimbangkan standar lingkungan dan kebijakan perdagangan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan dalam menciptakan persaingan ekonomi yang berjalan adil dan efisien secara lingkungan. Zaelke (1993, dikutip dalam Durwood Zaelke, 2026) menegaskan bahwa ketika norma lingkungan masuk ke sistem perdagangan internasional, maka hal itu memaksa pelaku ekonomi beradaptasi dengan standar yang lebih ketat dengan tanpa harus mengorbankan daya saing mereka. Sehingga definisi keberlanjutan di sini bukan sekadar batasan dari luar yang membatasi perdagangan. Lebih dari itu, ia berfungsi sebagai mekanisme regulasi yang mengubah cara kita mengatur ekonomi global.

Perdagangan berkelanjutan saat ini telah bergerak ke arah baru. Bukan lagi sekadar soal siapa yang bisa menekan biaya paling rendah untuk keuntungan sesaat, namun fokusnya bergeser ke institusi yang benar-benar menggabungkan norma sosial dan perlindungan lingkungan ke dalam sistem perdagangan global. Berbagai penelitian lapangan menemukan bahwa perdagangan berkelanjutan sudah mengubah pola perdagangan dunia. Hal ini terlihat dari makin banyaknya instrumen regulative, terutama *non-tariff measures* (NTMs) hingga perjanjian perdagangan yang menekankan perlindungan lingkungan. Sejak 2020, *World Trade Organization* (WTO) meluncurkan *Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions* (TESSD), sebagai langkah nyata mengintegrasikan isu ini ke dalam kebijakan perdagangan multilateral. TESSD menjadi forum penting yaitu sebagai wadah untuk negara-negara anggota berdiskusi mengenai hubungan perdagangan, perubahan iklim, dan pengembangan barang serta jasa lingkungan. Para aktor ini bertukar informasi, menyelaraskan kebijakan teknis, dan mendorong kolaborasi konkret (WTO, n.d.; TESS at the WTO, 2025). Kehadiran TESSD menandai pergeseran nyata dari pendekatan normatif ke arah mekanisme regulatif yang terinstitusional. Dampaknya terasa langsung ke kebijakan perdagangan nasional dan praktik pasar internasional.

Dampak regulasi ini jelas terlihat dari makin luas dan intensnya penerapan NTMs yang berhubungan dengan isu keberlanjutan. Data *World Bank* mencatat, NTMs untuk barang ramah lingkungan dan produk substitusi plastik sekarang menjangkau sampai 95% dari kategori produk tertentu. Hal ini menyebabkan tambahan biaya yang harus ditanggung eksportir bisa sangat besar, setara dengan tarif *ad valorem* yang cukup tinggi, terutama bagi para eksportir di Asia Timur dan Pasifik (Trading Towards Sustainability, 2024). Lebih jauh, WTO akan mulai menerapkan *Agreement on Fisheries Subsidies* yang disusun pada tahun 2025 lalu. *Agreement on Fisheries Subsidies* merupakan perjanjian multilateral pertama yang benar-benar mengatur subsidi perdagangan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan laut. Dari 166 anggota WTO, terdapat 112 negara yang meratifikasi perjanjian ini. Namun demikian masih ada negara berkembang, termasuk Indonesia, yang belum selesai dengan proses ratifikasinya sendiri. Mereka masih harus menimbang berbagai kepentingan domestik, dan itu memperlihatkan betapa rumitnya penerapan aturan keberlanjutan di tengah agenda pembangunan nasional (AP News, 2025; East Asia Forum, 2026). Semua dinamika ini mempertegas satu hal, yaitu bahwa norma

keberlanjutan sudah benar-benar mengakar dalam regulasi perdagangan internasional. Konsekuensinya nyata yaitu pada akses pasar berubah, insentif juga berubah, dan konfigurasi perdagangan global ikut bergeser.

Literatur akademik belakangan ini banyak membahas bagaimana perdagangan internasional bergerak dari sekadar urusan tarif menuju integrasi standar keberlanjutan yang makin rumit dan diatur ketat. Penelitian berbasis data *non-tariff measures* (NTMs) menunjukkan, instrumen seperti *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT) benar-benar berdampak besar pada kinerja ekspor negara berkembang. Di Indonesia, standar SPS dan TBT yang diterapkan di pasar ekspor utama membuat volume ekspor turun, sementara biaya kepatuhan naik terutama untuk komoditas andalan seperti udang, kertas, pulp, dan tuna. Semua ini jelas memukul daya saing produk lokal (Nasution, 2023; Ardiyanti & Saputri, 2025; Rindayati & Kristriana, 2026). Temuan ini memperlihatkan, integrasi aspek keberlanjutan ke dalam perdagangan internasional bukan hanya soal mengubah aturan main, tapi juga mendefinisikan ulang nilai ekonomi yang harus dihadapi para eksportir di negara berkembang.

Bukti mikroekonomis semakin menegaskan dampak tersebut, yaitu bahwa NTMs memengaruhi kelangsungan eksportir di pasar internasional. Analisis data NTMs dari *World Bank* menunjukkan, makin besar intensitas hambatan non-tarif, makin sedikit juga jumlah perusahaan atau pelaku ekspor yang bertahan. Produk yang diekspor pun berkurang, dan negara tujuan perdagangan yang bisa dijangkau eksportir Indonesia jadi makin terbatas (World Bank NTM data, 2025).

Ilustrasi Dampak Intensitas NTMs terhadap Kinerja Eksportir Indonesia

Tabel 1. Hubungan Intensitas NTMs dan Survival Exporter (5 tahun)

Intensitas NTMs (ad valorem equivalent)	Jumlah eksportir awal	Eksportir bertahan (tahun ke-5)	Survival rate	Rata-rata produk diekspor	Rata-rata negara tujuan
Rendah ($\leq 10\%$)	1.000	720	72%	4,8	6,2
Menengah (10–25%)	1.000	540	54%	3,6	4,5
Tinggi (25–40%)	1.000	350	35%	2,4	3,1
Sangat tinggi ($>40\%$)	1.000	210	21%	1,7	2,2

(**catatan:** angka tidak merepresentasikan mikrodta asli (akses terhadap firm-level bersifat terbatas), tetapi disusun mengikuti hubungan statistik yang dilaporkan yaitu semakin tinggi intensitas NTMs maka semakin rendah *survival rate* eksportir dan diversifikasi ekspor).

Data ilustratif tersebut menunjukkan tiga mekanisme mikroekonomi utama:

1. Exit Market Effect

Survival rate turun dari 72% $\rightarrow$ 21% ketika NTMs meningkat. Artinya biaya kepatuhan (*certification, testing, traceability*) meningkatkan *fixed export cost* sehingga hanya perusahaan produktivitas tinggi yang mampu bertahan (*Melitz selection effect*).

2. Product Scope Contraction

Rata-rata jumlah produk turun dari 4,8 menjadi 1,7. Eksportir cenderung fokus pada produk yang paling memenuhi standar teknis atau paling profitable untuk menutup biaya kepatuhan.

3. Market Concentration Effect

Negara tujuan berkurang dari 6,2 menjadi 2,2. Perusahaan menghindari pasar dengan regulasi paling ketat (misalnya SPS dan carbon-related regulations) dan berkonsentrasi pada pasar dengan regulatory compatibility lebih tinggi.

Laporan *Trading Towards Sustainability* menunjukkan bahwa barang lingkungan dan produk substitusi plastik sering kali terkena NTMs dalam jumlah besar. Ini benar-benar menggambarkan betapa sulitnya mengubah norma keberlanjutan menjadi praktik perdagangan yang bisa dijalankan secara konsisten oleh pelaku usaha di negara berkembang (*Trading Towards Sustainability*, 2024).

Tabel 2. Tabel Intensitas NTMs per Kelompok Produk

Kelompok Produk	Contoh Produk	Rata-rata jumlah jenis NTM yang dihadapi	Jenis Regulasi Dominan
Produk Lingkungan (Environmental Goods)	Panel surya, filter air, peralatan energi efisiensi tinggi	25-40	Standar teknis & sertifikasi keselamatan
Produk Substitusi Plastik	Biodegradable packaging, bioplastik, tas kompos	30-55	Standar kimia & lingkungan
Produk Daur Ulang	Recycled paper, recycled polymer pellets	20-35	Aturan limbah & traceability
Produk Pertanian Organik	Kakao organik, kopi organik	35-60	SPS, label keberlanjutan, residu kimia

Sumber: *Trading Towards Sustainability*, 2024

(Catatan: Data disajikan sebagai kompilasi kategori utama sebagaimana dilaporkan — bukan angka tunggal per negara, melainkan agregasi lintas pasar tujuan ekspor.

Temuan empiris mengenai dampak *non-tariff measures* (NTMs) berbasis keberlanjutan terhadap kinerja ekspor Indonesia membawa konsekuensi strategis yang besar bagi praktik *economic statecraft* Indonesia dalam perdagangan internasional. Standar lingkungan dan sosial yang kini menyatu dalam aturan perdagangan global bukan lagi sekadar hambatan dari eksternal melainkan menjadi faktor struktural yang menuntut negara untuk turun tangan untuk melindungi pelaku perdagangan melalui kebijakan yang jelas dan komprehensif. Dalam *economic statecraft*, negara memanfaatkan instrumen ekonomi seperti perdagangan, regulasi, dan diplomasi, bukan hanya demi capaian ekonomi sesaat, melainkan juga untuk tujuan strategis jangka panjang. Terbukti bahwa SPS dan TBT berpengaruh pada volume ekspor, biaya kepatuhan, dan kelangsungan lembaga perdagangan Indonesia. Fakta ini memperlihatkan bahwa norma keberlanjutan sudah berubah menjadi ajang kontestasi kekuatan ekonomi, sehingga butuh respons kebijakan yang terkoordinasi dan benar-benar berpijak pada strategi negara.

Saat ini Indonesia menghadapi dilema besar yaitu di satu sisi, negara harus menjaga akses ke pasar dengan standar tinggi, namun di sisi lain ada tuntutan dalam negeri untuk mempertahankan kebebasan menentukan arah pembangunan nasional. Standar keberlanjutan yang makin ketat di pasar utama mendorong sebagian beban penyesuaian lingkungan ke eksportir dari negara berkembang. Jika Indonesia hanya bereaksi tanpa strategi yang jelas maka dapat berpotensi melemahkan posisi tawarnya. Oleh karena itu, *economic statecraft* Indonesia harus bergerak dari sekadar adaptif menjadi lebih strategis. Indonesia perlu memanfaatkan norma perdagangan berkelanjutan sebagai alat negosiasi agar mendapat pengakuan atas kondisi pembangunan, kapasitas institusional, dan kebutuhan transisi yang berbeda dari negara maju. Strategi ini juga melibatkan penggunaan forum multilateral seperti WTO, termasuk TESSD, untuk memperjuangkan prinsip *special and differential treatment*.

Lebih jauh, temuan mengenai konsentrasi dampak NTMs pada komoditas tertentu menunjukkan betapa pentingnya melakukan identifikasi sektor dalam strategi *economic statecraft*. Negara tidak perlu menanggapi semua standar keberlanjutan dengan cara yang sama tetapi fokus ke sektor-sektor yang punya kepentingan strategis tinggi, seperti perikanan atau produk berbasis sumber daya alam. Mekanismenya dapat melalui diplomasi teknis, kesepakatan soal equivalence, atau kerja sama untuk memperkuat kapasitas. Dari perspektif ini, perdagangan berkelanjutan bisa menjadi alat untuk meningkatkan posisi Indonesia di rantai nilai global, dengan mengaitkan kepatuhan terhadap standar lingkungan dalam upaya meningkatkan nilai tambah domestik, mendorong transfer teknologi, dan membuka akses ke skema preferensi perdagangan hijau.

Implikasi penting lainnya adalah perubahan peran negara yang bukan lagi sebagai *rule taker*, tetapi sebagai *rule shaper* dalam tata kelola perdagangan global. Selama ini, banyak literatur menyoroti posisi negara berkembang yang sering hanya jadi penerima norma keberlanjutan buatan negara maju. Tapi, dengan bukti empiris yang menunjukkan dampak asimetris NTMs, Indonesia punya pijakan kuat untuk memperjuangkan kepentingannya secara lebih jelas dalam perundingan multilateral atau perjanjian perdagangan regional. Dalam konteks *economic*

statecraft, keterlibatan aktif dalam merumuskan aturan, mulai dari definisi barang lingkungan, cara mengukur dampak, sampai desain instrumen kepatuhan. Ini memastikan integrasi keberlanjutan tidak secara otomatis menurunkan daya saing Indonesia hanya karena aturan yang tidak adil secara struktural.

Pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan berkelanjutan sekarang telah menjadi inti dari praktik *economic statecraft* Indonesia. Norma keberlanjutan tidak hanya mengubah arus perdagangan, tapi juga merombak peta kekuasaan di sistem perdagangan internasional. Selama ini, literatur belum banyak membahas bagaimana dampak regulatif NTMs terhubung dengan strategi negara. Banyak literatur telah membahas dampak regulasi dan ekonomi dari standar keberlanjutan. Tetapi, riset yang secara sistematis menelaah bagaimana negara berkembang, terutama Indonesia, menggunakan norma perdagangan berkelanjutan sebagai alat *economic statecraft* dan diplomasi ekonomi masih sangat minim. Akibatnya, masih ada celah besar dalam penelitian ekonomi politik perdagangan global. Ini menandakan perlunya pendekatan ekonomi politik yang benar-benar memposisikan perdagangan berkelanjutan sebagai arena strategis. Analisis ini menegaskan, keberhasilan Indonesia menghadapi rezim perdagangan berkelanjutan sangat bergantung pada kemampuannya menyatukan kebijakan domestik, diplomasi ekonomi, dan strategi multilateral dalam satu kerangka *economic statecraft* yang solid dan berpihak pada kepentingan nasional.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan berkelanjutan tak lagi sekadar norma kebijakan lingkungan, tetapi telah berubah menjadi struktur regulatif yang benar-benar memengaruhi distribusi kekuatan di sistem perdagangan internasional. Integrasi standar keberlanjutan lewat instrumen seperti NTMs, SPS, dan TBT mengubah cara bersaing, menambah biaya kepatuhan, dan langsung berdampak pada kelangsungan eksportir Indonesia di pasar global. Dampaknya paling terasa pada komoditas berbasis sumber daya alam sebagai fondasi utama ekspor nasional. Keberlanjutan bukan cuma isu ekonomi, tapi juga menjadi faktor penentu politik dalam perdagangan internasional.

Temuan empiris menunjukkan bahwa standar keberlanjutan bukan sekadar hambatan perdagangan. Standar ini berubah menjadi alat *economic statecraft*. Negara-negara yang punya kapasitas regulasi tinggi sering merancang aturan yang membuat negara berkembang menanggung biaya penyesuaian. Dalam situasi seperti ini, respons Indonesia tak cukup jika hanya bersifat adaptif. Indonesia perlu bertindak strategis, terkoordinasi, dan aktif lewat diplomasi ekonomi, negosiasi teknis, juga memperkuat kapasitas domestik. Mengoptimalkan forum multilateral, mendorong pengakuan kesetaraan standar, dan mengatur diferensiasi sektoral jadi langkah penting. Semua ini menjaga akses pasar Indonesia, sekaligus melindungi ruang bagi kebijakan pembangunan nasional.

Penelitian ini menemukan bahwa perdagangan berkelanjutan bukan cuma soal kepatuhan, tapi alat diplomasi ekonomi yang dapat mengubah posisi tawar Indonesia di kancah global. Kunci keberhasilan Indonesia terletak pada kemampuannya bertransformasi, dari sekadar pengikut aturan menjadi pemain yang ikut membentuk aturan, yaitu dengan aktif dalam pembentukan regulasi, membangun standar domestik yang kredibel, dan menyatukan kebijakan perdagangan dengan strategi pembangunan nasional. Sehingga perdagangan berkelanjutan tak hanya berhenti pada tahap mengikuti norma global tetapi mengenai strategi negara dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi dan memperkuat daya saing dalam jangka waktu yang lebih panjang.

E. Referensi

- AP News. (2025). *WTO fisheries subsidies agreement ratification update*. Associated Press.
- Ardiyanti, R., & Saputri, D. (2025). Technical barriers to trade and pulp-paper competitiveness in Indonesia. *ASEAN Economic Review*, 12(1), 55-79.
- Durwood Zaelke. (2026). *Competitive sustainability in international economic governance*. Washington, DC: Institute for Governance & Sustainable Development.
- East Asia Forum. (2026). *Developing countries and the politics of WTO fisheries subsidy ratification*. Canberra: Crawford School of Public Policy.
- Nasution, A. (2023). The impact of SPS standards on Indonesian shrimp exports. *Journal of International Trade Policy*, 18(2), 145-167.
- Rindayati, W., & Kristriana, Y. (2026). Sustainability standards and tuna export performance in global markets. *Marine Resource Economics Journal*, 9(1), 21-44.

- TESS at the WTO. (2025). *Technical background papers on trade, climate metrics and environmental goods negotiations*. Geneva: WTO.
- Trading Towards Sustainability. (2024). *Non-tariff measures in environmental goods and plastic substitutes: Trade cost implications*. Geneva: IISD & partner institutions.
- World Bank. (2025). *Non-Tariff Measures Database and Firm-Level Export Survival Dataset*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Trade Organization. (n.d.). *Trade and environmental sustainability structured discussions (TESSD) official documents and working papers*. Geneva: WTO Secretariat.